

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Untuk menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomorduakan, dan ada yang dapat dipenuhi di kemudian hari. Menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.¹

Memenuhi kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan tidak membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan maupun kredit, disisi lain pihak seperti produsen selalu menawarkan barang secara kredit kepada konsumen dengan cara menanggukkan jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak, jaminan merupakan suatu benda yang diberikan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada debitur yang akan memenuhi kewajiban yang dapat dihitung dengan uang akibat dari suatu perikatan, sesuai Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada umumnya, masyarakat di Indonesia yang melakukan utang piutang dengan jaminan terhadap kreditur masih banyak yang tidak melakukan perjanjian dengan debitur, di dalam perjanjian utang piutang pada dasarnya kreditur dan debitur dibuat dengan bebas dengan bentuk lisan

¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Hal. 1-2

maupun tertulis tergantung para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang, padahal setiap kreditur berharap dalam melakukan perjanjian dengan debitur selalu mengharapkan jaminan yang di perjanjikan dengan debitur sama nilai jualnya dengan utang piutangnya yang diberikan oleh kreditur, namun ada kalanya perjanjian utang piutang tersebut tidak sesuai dengan nilai jual jaminan akan tetapi para pihak yang melakukan perjanjian tetap melakukan kesepakatan sesuai apa yang diperjanjian oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat;

1. *Sepakatan meraka yang mengikatkan dirinya.*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
3. *Suatu hal tertentu.*
4. *Suatu sebab yang halal.*

Perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.²

² Fransisca Kurnia Harkmawati, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012)*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jember, Hal. 1

Pada faktanya di dalam masyarakat masih banyak di temukan masalah utang piutang dengan lisan dan jaminan tidak sesuai dengan nilai jual yang diperjanjikan antara pihak kreditur dan debitur bisanya benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan berupa benda yang memenuhi syarat yaitu memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan, benda mempunyai pengertian yang luas yaitu segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan pengertian tentang benda “yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Jadi cakupannya sangat luas karena istilah benda di dalamnya terdapat istilah barang dan hak. Barang mempunyai pengertian bersifat konkrit dalam arti dapat dilihat, diraba misalnya buku, meja dan lain-lain, sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud misalnya piutang-piutang seperti piutang atas nama, hak milik intelektual seperti hak cipta, hak merk dan hak paten.³ Pada kasus Pengadilan Negeri Sragen Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Sgn. Adanya suatu perjanjian utang piutang terhadap pihak kreditur dan debitur dengan jaminan sebidang tanah milik debitur, yang mana dalam perjanjian tersebut antara pihak kreditur dan debitur sepakat dengan adanya utang piutang namun dalam perjanjian tersebut jaminan yang dijadikan tanggungan tidak sama nilainya dengan utang piutangnya.

Penguat dalam kasus ini sebagai kreditur yang melakukan perjanjian utang piutang dengan Tergugat I dan Tergugat II disebut debitur yang melakukan jaminan sertifikat sebidang tanah dengan luas : 535 m², atas nama

³Trisadini Prasastinah Usanti, *Piutang dalam Prespektif Hukum Jaminan*, Jurnal Ilmu hukum, Hal. 5-6

Tergugat I. Pada awalnya Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) untuk keperluan proyek yang akan dikerjakan oleh para Tergugat. Kemudian para Tergugat berjanji mengenai prosedur tentang pinjaman uang tersebut akan dikembalikan paling lambat selama 2 bulan dengan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) untuk penggugat. Setelah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh para pihak selama jangka waktu 2 bulan setelah peminjaman utang piutang akan dikembalikan secara lunas beserta keuntungannya yang sudah disepakati oleh para tergugat. Namun para tergugat sama sekali belum pernah ada pembayaran dari para tergugat dan tidak ada itikad baik sama sekali dari para tergugat untuk mengembalikan utangnya kepada penggugat. Penggugat telah berusaha menghubungi para tergugat guna menyelesaikan permasalahan ini secara baik, damai dan kekeluargaan namun tidak mendapatkan respon atau itikad baik sama sekali, maka sudah selayaknya bahwa perbuatan para tergugat telah melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga tergugat akan mendapatkan akibat hukum atas perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian dan menyusun Skripsi yang berjudul : **“JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Sgn.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pembahasan agar lebih terarah dan lebih efisien dapat dirumuskan masalah oleh penulis sebagai berikut:

1. Apakah Perjanjian Utang Piutang yang Dilakukan Antara Kreditur dan Debitur tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian?
2. Bagaimana Akibat Hukum Apabila Debitur Tidak Melaksanakan Isi Perjanjian Sesuai dengan Kesepakatan para Pihak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tindakan untuk mengetahui yang belum diketahui oleh orang lain, sehingga berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis memiliki tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui seberapa jauh perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh kreditur dan debitur tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- c. Untuk mengetahui kedudukan kreditur dalam perlindungan hukumnya.
- d. Untuk mengetahui kreditur atau debitur telah melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan sesuai dengan perjanjian utang piutang.

D. Manfaat Penelitian

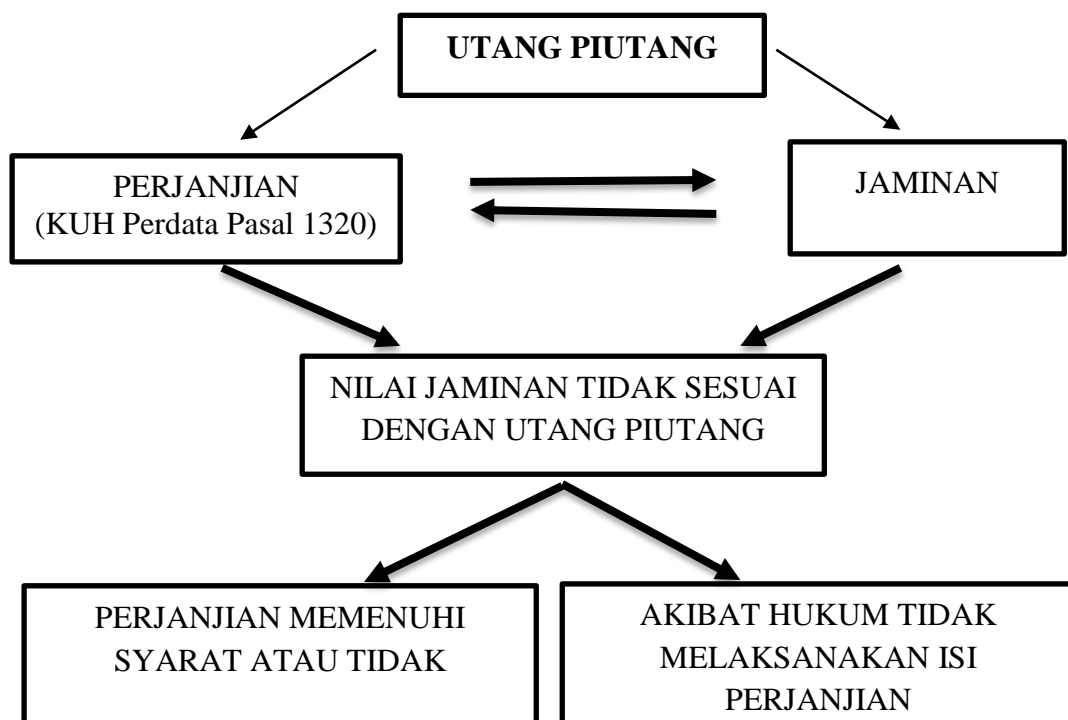
- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang baik dan pembaharuan ilmu pengetahuan pada umumnya bidang hukum perdata khususnya tentang jaminan dalam perjanjian utang piutang.
 - 2) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran baik bagi masyarakat agar tidak melakukan utang piutang dengan jaminan tidak sesuai dengan nilai utang.

- 3) Hasil penelitian ini untuk memperkaya literatur dan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan tentang jaminan dalam perjanjian utang piutang.

b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat dijadikan masukan dan pemikiran tentang jaminan dalam perjanjian utang piutang.
- 2) Hasil penelitian diharapkan akan menjadikan pembaharuan pemikiran dan wawasan bagi penulis untuk mengembangkan pola pikir yang dinamis dalam hukum perdata khususnya mengenai jaminan.

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan Bagan Kerangka Pemikiran Penulis :

Kerangka pemikiran merupakan menjelaskan alur berfikir penulis dalam menyusun skripsi ini. Utang-piutang antara kreditur dan debitur dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan, akan tetapi kreditur biasanya lebih

mempercayai debitur dengan tulisan dan jaminan yang sesuai dengan nilai utang piutang yang diperjanjikan, dalam perjanjian antara para pihak dilakukan dihadapan Notaris untuk melakukukan perjanjian kedua belah pihak agar tidak ada masalah di kemudian hari, dengan kebutuhan debitur yang semakin banyak, utang-piutang terhadap kreditur tinggi dan mengakibatkan debitur memberikan jaminan kepada kreditur tidak sesuai dengan nilai utang piutangnya dalam melaksanakan perjanjian yang dilakukannya telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 .

Apabila dalam pelaksanaan jaminan dalam perjanjian utang piutang salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian maka sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 dianggap wanprestasi. Kreditur maupun debitur akan mendapatkan akibat hukum sesuai peraturan Perundang-undangan yang mana dapat dilakukan upaya hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Putusan berkekuatan hukum tetap.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini yang digunakan penulis dalam skripsi ini merupakan pendekatan pada kasus (*Case Approach*) yaitu menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Sragen Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Sgn. Penulis dapat mengetahui perjanjian dengan jaminan dalam utang piutang telah memenuhi syarat-syarat perjanjian, akibat hukum kreditur atau debitur tidak melaksanakan perjanjian dan dalam perjanjian utang piutang tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan mengenai jaminan dan perjanjian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan normatif, Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum sehingga penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁴ karena penulis ingin menelaah mengenai jaminan dalam perjanjian utang piutang, peraturan yang berkaitan dengan jaminan dalam perjanjian utang piutang dan akibat hukum apabila tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian.

3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini merupakan bersifat deskriptif yang mana metode ini tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan dan menyusun data saja, tetapi meliputi juga analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itu penelitian ini dapat diwujudkan juga sebagai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dengan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar,

⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 36

menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain.⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif karena menggunakan analisa data dari Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sgn, sehingga penulis dapat menganalisi perjanjian telah memenuhi syarat perjanjian dengan jaminan antara kreditur dengan debitur dan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini sesuai dengan jenis data yang digunakan penulis menggunakan data sekunder yang berupa sumber data sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Skripsi ini menggunakan bahan hukum primer yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Sgn, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR, Yurisprudensi

⁵ Soejono & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, Hal. 24

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, Hal. 81

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang digunakan sebagai bahan tambahan dari bahan hukum primer merupakan buku-buku hukum termasuk skripsi, thesis dan disertasi hukum dan jurnal hukum, disamping itu kamus-kamus hukum dan kometar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ dalam penelitian ini menggunakan bahan yaitu: buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi dan komentar putusan pengadilan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melengkapi penelitiannya. Bahan pustaka yang dimaksud biasanya disimpan dan dapat dilihat pada perpustakaan seperti buku, jurnal dan linteratur pendukung lainnya.⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan karena semua bahan untuk menyusun skripsi menggunakan Peraturan Perundang-undangan mengenai jaminan, perjanjian utang piutang, jurnal ilmu hukum, tesis, disertasi dan analisa Putusan perdata Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN. Sgn.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data menggunakan Kualitatif karena dalam penelian ini tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya dari Putusan Pengadilan

⁷ *Ibid*, Hal. 195-196

⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Gratika, Hal. 50-51

Negeri.⁹ Penelitian penulis ini memberikan penafsiran terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Sgn. tentang jaminan dalam perjanjian utang piutang maka dari itu penulis dapat memberikan analisa sesuai dengan tujuan dan permasalahan penulis.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika skripsi atau penulisan hukum ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran global keseluruhan ini bahasan yang akan di teliti oleh penulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menggambarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum jaminan , tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum utang piutang, tinjauan umum wanprestasi dan tinjauan umum upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur atas wanprestasi debitur.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai para pihak yang bersengketa dalam perjanjian dan duduk perkara antara kreditur dan debitur, perjanjian utang piutang yang dilakukan antara kreditur dan debitur tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian, akibat hukum

⁹ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, Hal. 100

apabila kreditur dengan debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan antara para pihak.

BAB IV : PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian hukum mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terkait hasil penelitian dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA